



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
KAPUAS



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

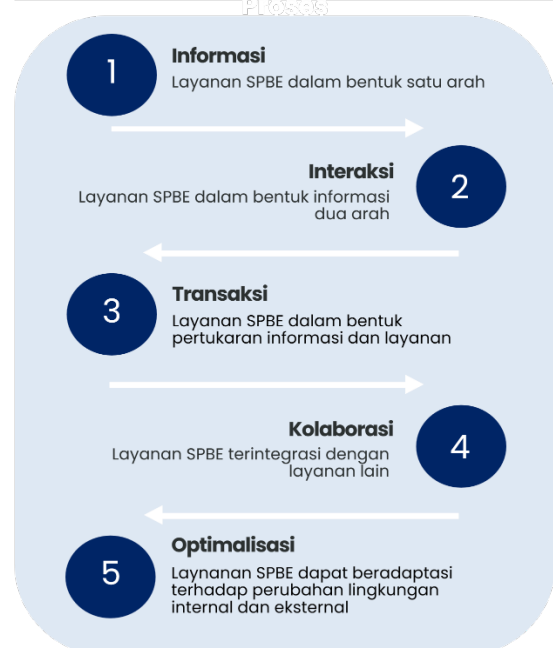
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



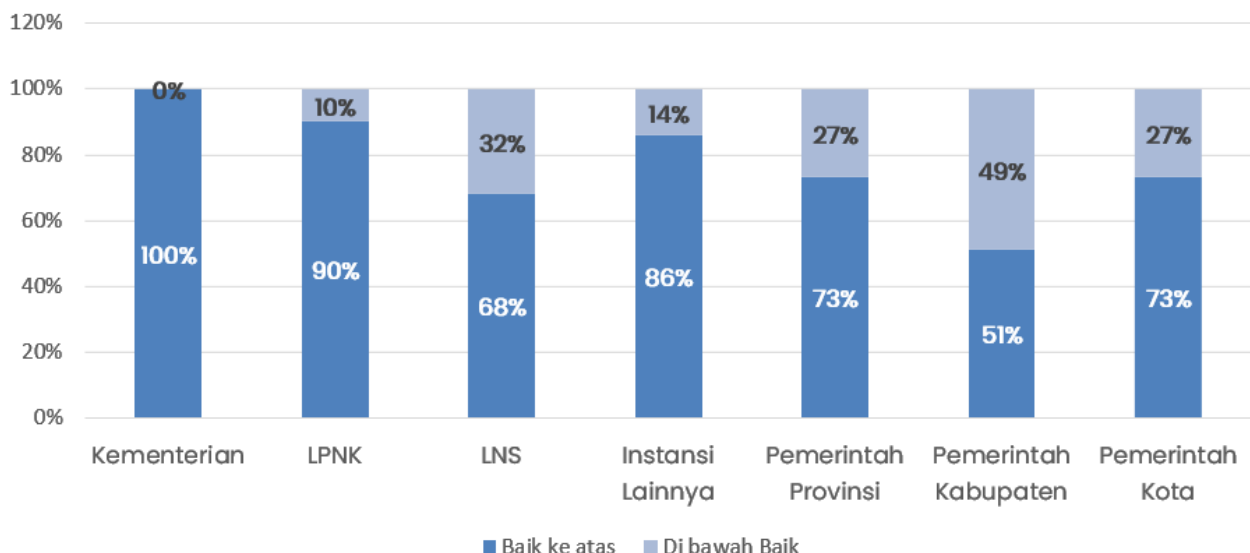
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

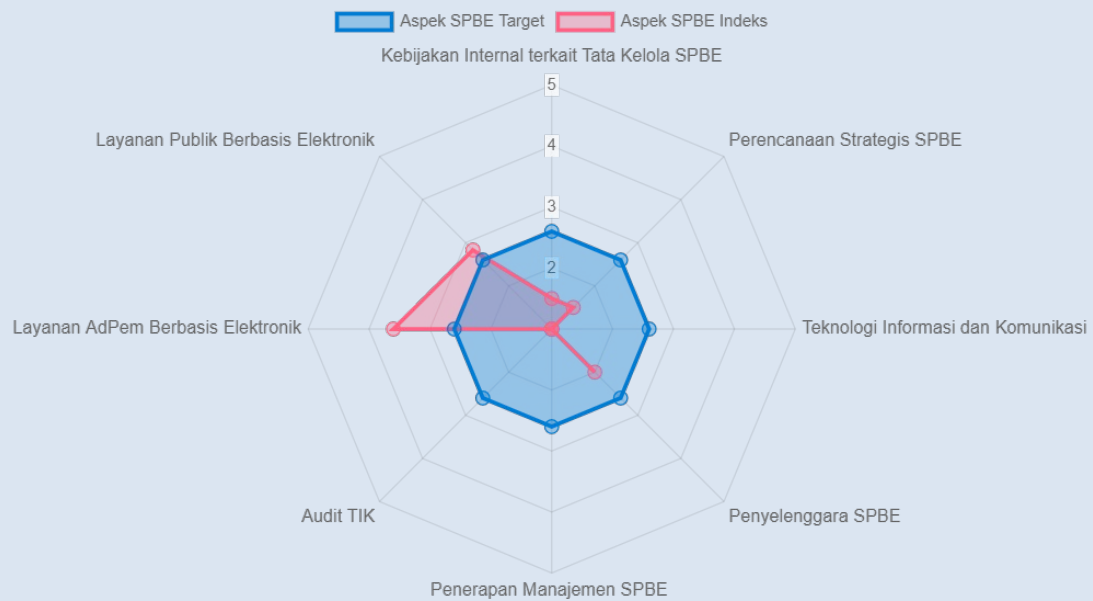
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,21
Domain Kebijakan SPBE	1,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	1,50
Domain Tata Kelola SPBE	1,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,30
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	2,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas telah terpenuhi adalah indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, indikator kebijakan internal layanan Pusat Data, indikator tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra dan indikator tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, belum ada indikator yang menjadi kekuatan. Namun pada indikator tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE, telah mendapatkan level 3 dengan data dukung berupa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas, Tentang Susunan Tim Koordinasi SPBE, SK tim koordinasi SPBE sudah menjabarkan tugas tim. Indikator ini dapat menjadi peluang untuk menjadi indikator kekuatan dalam meningkatkan aspek kebijakan internal tata Kelola.

- Kelemahan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat indikator yang menjadi kelemahan untuk aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yaitu indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung, tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi, tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi, Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data dan tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki Peraturan Bupati terkait Tata Kelola SPBE dengan nama peraturan: PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, namun peraturan ini tidak mencakup keseluruhan referensi. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten telah Menyusun DRAFT PERATURAN BUPATI KAPUAS TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS dimana sudah mencakup keseluruhan referensi. Namun karena dokumen formal harus merupakan dokumen yang sudah disahkan maka data dukung yang digunakan adalah peraturan bupati tahun 2019.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perancangan Strategis SPBE terdapat dua indikator yang sudah memenuhi yaitu indikator Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kekuatan pada indikator terkait aspek perencanaan strategis SPBE.

- Kelemahan

Pada Aspek Perencanaan Strategis, Pemerintah Kabupaten Kapuas masih memiliki kelemahan untuk indikator Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, indikator Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE, indikator Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Pada indikator Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan indikator Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE, tidak ada data dukung yang dilampirkan. Pada indikator Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Data dukung yang dilampirkan dalam bentuk file excel, namun tidak semua referensi domain arsitektur SPBE. Oleh sebab itu referensi Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah berada pada tingkat 2. Pada indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Proses bisnis telah dilampirkan namun proses bisnis merupakan proses bisnis umum yang bukan dikhususkan untuk proses bisnis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan tidak ada indikator yang telah dilaksanakan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

- Kekuatan

Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Kelemahan
Terdapat indikator yang masih menjadi kelemahan untuk Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu Indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, penggunaan sistem penghubung dan layanan Pemerintah Daerah dimana untuk seluruh indikator pada aspek ini tidak ada data dukung yang dilampirkan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan pada aspek Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas belum ada indikator yang telah memenuhi.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Namun untuk indikator tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE, telah mencapai level 3 dimana berdasarkan data dukung yang dilampirkan bahwa IPPD telah memiliki program kolaborasi penerapan SPBE dan telah ada penetapan asesor internal, namun data dukung belum menunjukkan bahwa telah ada reviu. Indikator ini dapat menjadi peluang untuk ditingkatkan menjadi kekuatan bagi aspek Penyelenggaraan SPBE.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Indikator yang masih kategori lemah yaitu indikator Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan indikator kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Untuk indikator kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, Pemerintah Kapuas melampirkan data dukung yaitu dokumen Surat KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR 286/ORG 2022 tentang tim koordinasi SPBE di lingkungan kabupaten namun data dukung tidak menunjukkan telah ada pelaksanaan program kerja.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE tidak ada indikator yang telah memiliki nilai pemenuhan aspek.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek penerapan manajemen SPBE pada pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kapuas masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE dimana tidak ada data dukung yang dilampirkan

F. Audit TIK

Secara keseluruhan belum ada aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek pelaksanaan audit TIK pada pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kapuas masih belum melaksanakan pelaksanaan Audit TIK seperti Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam pelaksanaan audit TIK yang disampaikan. Tidak ada data dukung yang dilampirkan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, indikator Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat indikator yang menjadi kekuatan yaitu indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan (34), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (35), Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menggunakan aplikasi berbagi pakai seperti Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu SIPD yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah mampu

memberikan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tangkapan layar.

- Kelemahan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak ada indikator yang menjadi kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah terpenuhi untuk semua indikator pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Adapun indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek layanan publik berbasis elektronik adalah Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 2. Pada pengaduan pelayanan publik sudah menggunakan aplikasi berbagi pakai yaitu aplikasi SP4N LAPOR yang dibuktikan dengan data dukung tangkapan layar penggunaan aplikasi ini. Untuk indikator layanan publik sektor 2 dan 3. Adapun aplikasi diajukan sebagai indikator pelayanan public sektor 2 adalah yang aplikasi OSS dan aplikasi SICANTIK yang telah memiliki proses kolaborasi dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas masih belum memiliki Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada indikator Layanan Publik Sektor 1, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka dan indikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pada Indikator Layanan Publik Sektor 1, Berdasarkan data dukung yang diberikan, IPPD melampirkan tampilan layar aplikasi milik PUPR yang Bernama SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) di url <https://simbg.pu.go.id/>. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan juga IPPD dalam perizinan bangunan Gedung. Perlu konfirmasi lebih lanjut terkait aplikasi ini apakah memang merupakan aplikasi yang memang diterapkan di IPPD. Karena berdasarkan data dukung hanya menunjukkan bahwa IPPD sekedar hanya sebagai user saja. Pada indikator tingkat kematangan data terbuka Pemerintah Kabupaten Kapuas menerapkan Tangkapan layar aplikasi KIP Aplikasi sudah memenuhi level unggah dan unduh. Namun aplikasi belum menunjukkan telah memenuhi level transaksi sehingga tidak memenuhi level 3. Untuk indikator tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berdasarkan data dukung menunjukkan bahwa IPPD telah menerpkan Aplikasi JDIH yang diterapkan sudah memiliki kemampuan melayani unggah, file produk hukum, unduh data produk hukum, pencarian produk hukum. Namun JDIH belum memiliki fitur transaksi dan terintegrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.

REKOMENDASI

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas, menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, aspek yang memiliki keunggulan adalah aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menggunakan aplikasi berbagi pakai yang sebagian besar telah memenuhi level kolaborasi dan integrasi.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penerapan Manajemen SPBE , Audit TIK Perencanaan Strategis SPBE dan aspek Audit TIK. Aspek-aspek ini bernilai rendah karena terdapat data dukung tidak dilampirkan dan beberapa data dukung yang dilampirkan tidak relevan dan tidak lengkap. Pada aspek audit TIK dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam pelaksanaan audit TIK yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Kapuas masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE walaupun beberapa indikator sudah dilengkapi dengan data dukung tetapi tidak tertuang dalam peta rencana.

Apresiasi/SaranPerbaikan

Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola yang masih belum optimal direncanakan dapat disusun dalam bentuk master plan atau perencanaan TIK. Untuk aspek perencanaan strategies dibangun kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi berdasarkan dari kebijakan yang telah disusun di Master Plan. Begitu juga untuk aspek lainnya seperti Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggaraan SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Untuk beberapa aspek agar dapat ditingkatkan dari nilai standar menjadi rerata unggul seperti pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik agar dapat meningkatkan aplikasi dengan proses reviu secara berkesinambungan dan juga optimasi fungsi aplikasi. Untuk aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE agar dapat melakukan reviu dan tindak lanjut secara periodik dan juga optimasi kebijakan.

Peningkatan nilai aspek untuk kebijakan internal tata Kelola SPBE dapat dilakukan dengan mengesahkan DRAFT PERATURAN BUPATI KAPUAS TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS dimana sudah mencakup keseluruhan refrensi.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4